

RENCANA KERJA
BAKESBANGPOL 2025
(RANCANGAN AKHIR)

////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////
////////////////////////////////////

RENJA TAHUN 2025
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara itu paralel dengan pembuatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyumas yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja SKPD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas,

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang diberikan kepada kabupaten.

Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD .

Selanjutnya Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini dijadikan acuan dalam membuat Rencana Kerja Anggaran tahun 2025 dan sebagai pedoman dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421), pada Pasal 7 ayat (2) “Renja-SKPD disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKP, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat “.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah , serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Tahun 2024-2026 Pemerintah Kabupaten Banyumas

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 ini dimaksudkan agar program dan kegiatan tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026 serta Rencana Strategis Transisi SKPD (RENSTRA Transisi SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

2. Tujuan Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2025 dengan tujuan

untuk dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang Bangsa dan Politik 1 (satu) tahun kedepan agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran dan program pembangunan yang telah ditetapkan.

1.4 Sistematika Penulisan Renja SKPD

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN

LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan, berisikan penjelasan mengenai:

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program / kegiatan yang telah memenuhi target, tidak memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui :

1. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan .
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah ; dan
3. Kebijakan / Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas tahun 2024 berdasarkan dan merujuk pada Renstra Strategis Transisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten banyumas Tahun 2024-2026, serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banyumas Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Keja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas sampai dengan tahun 2024 (tahun lalu) adalah sebagai berikut :

Evaluasi RKPD Tahun 2024 Triwulan II

OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SUB OPD : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Tujuan/Sasaran/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja tujuan, sasaran, program, kegiatan	Satuan	Target Renstra SKPD pada tahun 2024	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan tahun 2023	Target Kinerja Renja SKPD Tahun Berjalan 2024						Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD 2024	Tingkat Capaian kinerja dan Realisasi Anggaran 2024 (%)	Realisasi Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra SKPD s/d Tahun 2024		Perma salahan	Keterangan			
											1		2											
											8		9									12=8+9+10+11		13=12/7*100
3	4	4A	5		6		7				8		9		12=8+9+10+11		13=12/7*100		14=6+12		15=14/5*100		16	17
			K	Rp	K	Rp	K	Rp Renja	DPA INDUK		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	%	K	Rp	K	Rp		
[1] Meningkatnya Kondusivitas Ipoleksosbudhankam di masyarakat																								
	standart deviasi potensi konflik Ipoleksosbudhankam	Angka	6,3				6,5		6,5		2,8		3,84		3,84		140,92		3,84		155,56			Jumlah potensi konflik Januari - Juni 2024 = 15 Jumlah data = 4 (tahun 2021-2024) 2021 : 17 2022 : 15 2023 : 7 2024 : 15 Standar deviasi (2021-2024) = 3.84
[2] Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam bidang politik																								
	Cakupan pemilih yang memperoleh pendidikan politik	%	0,045				0,015		0,015		0,701		0,72		0		0				3157,78			Jumlah pemilih yang memperoleh pendidikan politik hingga 31 Juni 2024: 10.000 Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT: 1.382.671 10.000/1.382.671*100%=0.72%
[3] PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN								50.920.914.000		50.920.914.000		47.144.305.400		2.238.542.000		49.382.847.400		4,39						

LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK																								
	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	100				100		100		75		100		100		100		100		100			Rencana program: 1. Sarasehan Demokrasi 2. Pemantauan Situasi Politik 3. Hibah Pemilu/Pilkada 4. Hibah Bankeupol Yang terlaksana hingga 31 Mei 2024: 1. Sarasehan Demokrasi 2. Pemantauan Situasi Politik 3. Hibah Pemilu/Pilkada 4. Hibah Bankeupol 4/4*100%=100%
[4] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							50.920.914.000		50.920.914.000		47.144.305.400		2.238.542.000		49.382.847.400		4,39							

	jumlah kebijakan di bidang politik yang di susun / direviu	Dokumen	6				2		2		0		2		2		100		2		33,33			1. SK Bupati Banyumas Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Parpol 2. SK Bupati Banyumas Nomor 178 Tahun 2024 tentang Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Parpol
[5] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								1.589.948.600		1.589.948.600		803.465.000		292.200.000		1.095.665.000		18,38						
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	2010				670		2000		9700		300		10000		500		10000		497,51			Sarasehan Demokrasi/Pendidikan Politik Bagi Masyarakat dengan total peserta 300 orang dari 3 kali kegiatan

[5] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								49.330.965.400		49.330.965.400		46.340.840.400		1.946.342.000		48.287.182.400		3,94							
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang	1080				360		400		40		95		135		33,75		135		12,5				- Sosialisasi Pengajuan Permohonan Bankeupol tgl 18-04-2024 (25 orang) - Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bankeupol tgl 17-05-2024 (20 orang) - Penyerahan Simbolis dan Pembinaan Penggunaan Bankeupol Tahap I tgl 10-06-2024 (50 orang)
[2] Meningkatnya upaya pemeliharaan persatuan dan kesatuan bangsa di masyarakat																									
	Persentase penyelesaian potensi konflik Ipoleksosbudhankam	%	80				80		80		100		100		100		125		100		125			Jumlah potensi konflik hingga 31 Juni 2024 = 15 Jumlah potensi konflik yang	

																									tertangani = 15 15/15*100% = 100%
[3] PROGRAM PENGUATA N IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSA AN								1.488.131.300		1.488.131.300		145.184.673		112.801.000		257.985.673		7,58							
	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	%	100					100		100		40		40		40		40		40		40			Rencana program: 1. Paskibraka 2. TMMD 3. FPK 4. TUNAS MUDA 5. PKK Yang terlaksana hingga 31 Mei 2024: 1. Paskibraka 2. TMMD 2/5*100%=40%
[4] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapa n Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan								1.488.131.300		1.488.131.300		145.184.673		112.801.000		257.985.673		7,58							
	Jumlah kebijakan di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang disusun / direviu	Dokum en	6					2		2		1		0		1		50		1		16,67			Belum ada kebijakan yang disusun/direviu
[5] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan , Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan , Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								650.119.800		650.119.800		72.934.673		31.500.000		104.434.673		4,85							

[illegible]

kat, Berbangsa, dan Bernegara																									
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga	162				54		100		0		0		0		0			0					
[3] PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBA NGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA								68.349.900		68.349.900															
	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama	%	100				100		100		0		0		0		0			0					Rencana program: 1. P4GN 2. FKUB Yang terlaksana hingga 31 Mei 2024: Tidak ada 0/2*100% = 0%
[4] Perumusan Kebijakan Teknis dan Peman tapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya								68.349.900		68.349.900															
	Jumlah kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang disusun / direviu	Dokumen	6				2		2		0		0		0		0			0					Belum ada kebijakan yang disusun/direviu hingga April - Mei 2024

[illegible]

	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang	288				96		350		0		0		0		0				0			
[3] PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN							305.000.000		305.000.000		19.346.000		98.800.000		118.146.000		32,39							
	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	%	100				100		100		0		50		50		50		50		50			Rencana program: 1. Pemantauan Ormas 2. Sarasehan Ormas Yang terlaksana hingga 31 Mei 2024: 1. Sarasehan Ormas dalam bentuk Fasilitasi FKPPi dan IARMI 1/2*100% = 50%
[4] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan							305.000.000		305.000.000		19.346.000		98.800.000		118.146.000		32,39							
	Jumlah kebijakan pengawasan dan pemberdayaan ormas yang disusun direviu	Dokumen	3				1		1		0		0		0		0				0			Belum ada kebijakan pengawasan dan pemberdayaan ormas yang disusun/direviu pada April - Mei 2024
[5] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas,							300.200.000		300.200.000		19.346.000		122.106.200		141.452.200		40,67							

Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang	720				240		700		0		1130		1130		161,43		1130		156,94			- Fasilitas FKPPi kegiatan FGD tgl 04-05-2024 (50 orang) - Fasilitas FBE kegiatan Pembinaan & Silaturahmi Ormas tgl 04-05-2024 (200 orang) - Sarasehan Demokrasi (Pokir) tgl 9 s.d. 12-05-2024 (600 orang) - Fasilitas IARMI kegiatan Rakor DPKom IARMI tgl 11-05-2024 (80 orang) - Fasilitas MUI kegiatan Silaturahmi & Rakor tgl 08-06-2024 (100 orang) - Fasilitas DPC GPP kegiatan Diskusi Kebangsaan tgl 15-06-2024 (100 orang)
[5] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								4.800.000		4.800.000														
	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan	36				12		1		0		0		0		0				0			Belum ada laporan tahunan namun tersedia progres laporan bulan April, Mei, dan Juni 2024

[3] PROGRAM PENINGKAT AN KEWASPAD AAN NASIONAL DAN PENINGKAT AN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGAN AN KONFLIK SOSIAL								1.821.136.400		1.821.136.400		916.310.000		200.821.000		1.117.131.000		11,04						
	Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	%	100				100		100		60		80		80		80		80		80			Rencana program: 1. Penanganan Konflik Sosial 2. Pemantauan Orang Asing 3. Kewaspadaan Dini Daerah 4. FKDM 5. Forkopimda Yang terlaksana hingga 31 Mei 2024: 1. Penanganan Konflik Sosial 2. Kewaspadaan Dini Daerah 3. Forkopimda 4. FKDM 4/5*100% = 80%
[4] Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapa n Kewaspada an Nasional dan Penangana n Konflik Sosial								1.821.136.400		1.821.136.400		916.310.000		200.821.000		1.117.131.000		11,04						
	Jumlah Kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun / direviu	Dokum en	6				2		2		0		0		0		0				0			Belum ada kebijakan yang disusun/direviu hingga April - Mei 2024
[5] Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspada an Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantaua n Orang								243.010.000		243.010.000		77.050.000		64.878.000		141.928.000		26,7						

Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaan, serta Penangana n Konflik di Daerah																								
	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	270				270		500		98		415		415		83		415		153,7			
[5] Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantaua n Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa								765.865.000		765.865.000		491.090.000		103.050.000		594.140.000		13,45						

Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																								
	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang	270				90		2000		1000		36		1036		51,8		1036		383,7			
[5] Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaa n Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah							612.143.000		612.143.000		322.370.000		90.430.000		412.800.000		14,77							

	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan	36				12		1		3		2		5		500		5		13,89			Laporan Hasil Pemantauan dan Deteksi Dini Bulan April - Mei 2024
[5] Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/ Kota							200.118.400		200.118.400		40.200.000		37.310.400		77.510.400		18,65							
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	18				6		1		3		3		6		600		6		33,33			1. Risalah Rapat Koordinasi Forkopimda Bulan April 2024
[3] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							5.184.555.759		5.184.555.759		272.920.709		2.112.619.926		2.385.540.635		40,73							
	Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah	%	100				100		100		5,26		36,7		36,7		36,7		36,7		36,7			1.903.719.926/5.184.555.759*100%=36.7%
[4] Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							64.879.700		64.879.700		13.105.000		570.000		13.675.000		0,88							
	Jumlah dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	7				2		2		1		0		1		50		1		14,29			Tidak ada realisasi pada bulan April - Mei 2024

[5] Penyusunan Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah							50.829.700		50.829.700		13.105.000		570,000		13.675.000		1,12						
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokum en	3			1		2		1		0		1		50		1		33,33			Belum ada dokumen perencanaan yang dibuat pada bulan April - Mei 2024
[5] Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							14.050.000		14.050.000														
	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Lapora n	3			1		1		1		0		1		100		1		33,33			Tidak ada laporan evaluasi kinerja yang dibuat pada bulan April - Mei 2024
[4] Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.677.673.031		3.677.673.031				1.794.632.342		1.794.632.342		48,79						
	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lapora n	6			2		2		0		1		1		50		1		16,67			Laporan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Semester I 2024
[5] Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							3.597.093.031		3.597.093.031				1.776.137.342		1.776.137.342		49,38						
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ bulan	23			23		22		24		24		24		109,09		24		104,35			Pembayaran gaji ASN sejumlah: - 24 orang pada bulan April 2024 - 24 orang pada bulan Mei 2024 - 24 orang pada bulan Juni 2024
[5] Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							80.580.000		80.580.000				18.495.000		18.495.000		22,96						
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokum en	36			12		1		1		1		2		200		2		5,56			Laporan honorarium pengelola keuangan dan pengelola BMN TW II 2024.
[4] Administrasi Umum Perangkat Daerah							547.397.200		547.397.200		91.101.400		84.787.000		175.888.400		15,49						

	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan	21				7		7	5		2		7		100		7		33,33		Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah = 7 meliputi: - Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Yang sudah dibuat hingga TW II 2024: - Laporan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor - Laporan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Laporan Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Laporan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga - Laporan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan - Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Laporan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
[5] Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							16.572.000		16.572.000													
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12				4		1	0		1		1		100		1		8,33		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan pada TW II: 1 paket berupa batu baterai, lampu, dll.
[5] Penyediaan Peralatan dan							111.652.000		111.652.000		10.800.000		16.065.000		26.865.000		14,39					

Perlengkap an Kantor																								
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12				4		1		3		1		4		400		4		33,33			Realisasi sampai dengan TW II: 1. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya 2. Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya 3. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor 4. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas Cover
[5] Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								12.612.000		12.612.000														
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	12				4		1		0		1		1		100		1		8,33			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan pada TW II : 1 paket belanja yang terdiri dari pengharum mobil, sabun cuci, kapur barus dll.
[5] Penyediaan Bahan Logistik Kantor								150.008.000		150.008.000		27.285.000		30.568.000		57.853.000		20,38						
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	12				4		1		4		1		5		500		5		41,67			Jenis-jenis paket adalah sebagai berikut: 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Natura dan Pakan-Natura 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4. Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu 5. Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Yang sudah direalisasikan pada TW II: 1. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas 2. Belanja Natura dan Pakan-Natura 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 4. Belanja Makan dan Minuman Jamuan Tamu 5. Belanja Bahan - Isi Tabung Gas Selanjutnya di setiap triwulan juga masih akan dibelanjakan untuk paket belanja yang sama.
[5] Penyediaan Barang								24.504.700		24.504.700		11.920.000				11.920.000		0						

Cetakan dan Penggandaan																								
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12				4		1		2		1		3		300		3		25			Jenis paket yang dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Belanja ATK 2. Cetak Banner 3. Cetak Dokumen Yang sudah direalisasikan hingga TW II: 1. Belanja ATK (Fotokopi, Map, Kartu Kendali, dll) 2. Cetak Banner 3. Cetak Dokumen
[5] Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							231.048.500		231.048.500		41.096.400		38.154.000		79.250.400		16,51							
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	4				4		1		1		2		2		200		2		50			Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD TW II 2024 Adapun jumlah rapat koordinasi dan konsultasi adalah sebagai berikut (April - Juni 2024) a. Perjalanan dinas luar daerah : 7 b. Perjalanan dinas dalam daerah : 0
[5] Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							1.000.000		1.000.000															
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	2				2		1		1		1		1		100		1		50			Laporan Naskah Masuk & Naskah Keluar Tahunan. Progress data per triwulan tersedia.
[4] Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							153.431.000		153.431.000		127.970.000				127.970.000		0							
	Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	6				2		2		1		0		1		50		1		16,67			Laporan Mutasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas (PD Bakesbangpol) Semester I Tahun 2024
[5] Pengadaan Peralatan							72.000.000		72.000.000		71.930.000				71.930.000		0							

dan Mesin Lainnya																								
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	18				6		1		11		0		11		1100		11		61,11			Tidak ada realisasi pada bulan April - Mei 2024
[5] Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							81.431.000		81.431.000		56.040.000				56.040.000		0							
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	3				1		1		2		0		2		200		2		66,67			Tidak ada realisasi pada bulan April - Mei 2024
[4] Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							600.004.828		600.004.828		18.839.500		191.344.584		210.184.084		31,88							
	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	6				2		2		2		0		2		100		2		33,33			Laporan TW II dibuat pada akhir bulan Juni 2024
[5] Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							141.333.184		141.333.184		18.839.500		42.512.674		61.352.174		30,09							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36				12		1		1		1		2		200		2		5,56			Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik TW II
[5] Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							458.671.644		458.671.644				148.831.910		148.831.910		32,45							
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	36				12		1		3		2		5		500		5		13,89			Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Bulan April - Mei 2024 terdiri dari: - Laporan gaji PHL bulan April 2024 - Laporan gaji PHL bulan Mei 2024 - Laporan gaji PHL bulan Juni 2024

[4] Pemeliharaan n Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah								141.170.000		141.170.000		21.904.809		41.286.000		63.190.809		29,26						
	Jumlah laporan pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	9				3		3		1		0		1		33,33		1		11,11			Belum ada laporan TW II
[5] Penyediaan Jasa Pemeliharaan n, Biaya Pemeliharaan n, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								70.650.000		70.650.000				20.846.000		20.846.000		29,5						
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	17				17		17		6		14		14		82,35		14		82,35			Realisasi sampai dengan TW II: Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 - Toyota Avanza R 9507 SG - Innova R 1091 XA - Toyota Avanza R 1501 XA - Toyota Avanza R 9507 RG - Innova R 9501 KG Pajak Motor - R 6027 XA - R 6030 XA Pajak Mobil - R 9507 SG - R 9507 RG
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								34.970.000		34.970.000		21.904.809				21.904.809		0						
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3				1		1		1		1		2		200		2		66,67			1 Unit Gedung - Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pekerjaan bongkar lantai, pemasangan pipa dan pekerjaan lain-lain.
[5] Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan								35.550.000		35.550.000				20.440.000		20.440.000		57,49						

Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																									
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3				1		1		3		1		4		400		4		133,33				1 Unit berupa : a. Belanja Pemeliharaan Sarpras berupa bongkar pasang dan ganti isi media water treatment, perbaikan pintu gerbang,

Capaian Kinerja Utama yang belum tercapai dikarenakan pengambilan data data tersebut diambil dalam satu tahun yang dihitung pada setiap akhir tahun kegiatan. Faktor faktor penyebab tidak tercapainya kinerja Program dan Kegiatan diantaranya banyak kegiatan yang dilaksanakan pada triwulan III dan IV yang turut menyumbang dalam belum tercapainya target target dari kinerja. Serapan anggaran yang masih rendah juga dipengaruhi adanya kebijakan pelaksanaan penyerapan anggaran yang belum disosialisasikan .

Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bakesbangpol Kabupaten Banyumas dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 59.788.087.359,00 dengan 6 program dan 11 kegiatan. Dari jumlah anggaran tersebut pada semester pertama sudah terealisasi sebesar Rp. 53.394.204.308,00 dengan capaian kinerja fisik sebesar 89,33 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 89,3% . Dengan penyerapan anggaran terendah dan tertinggi yaitu pada kegiatan:

1. Penyerapan terendah pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya I dengan penyerapan anggaran sebesar 0 %;
2. Penyerapan tertinggi pada kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum / Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi, dengan penyerapan anggaran 96,96 %;

Dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, Silpa anggaran Bakesbangpol Kabupaten Banyumas adalah sebesar Rp. 6.393.883.051 ,00 .

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 92 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Banyumas menghadapi permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pembinaan ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama .
2. Belum optimalnya koordinasi penanggulangan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba
3. Masih rendahnya upaya deteksi dini potensi konflik di masyarakat.
4. Masih kurangnya peran aktif Ormas dalam kegiatan pembangunan yang berwawasan nusantara.
5. Belum optimalnya penguatan ideologi pancasila dan karakter bangsa.
6. Kurangnya peran serta parpol dalam pendidikan politik.
7. Kurangnya pendidikan politik masyarakat

Upaya pemecahan masalah yang ditempuh adalah sebagai berikut :

1. Memfasilitasi kegiatan yang kaitannya dengan Ketahanan Ekonomi, Budaya dan Agama diantaranya Fasilitasi kegiatan FKUB, FPK.
2. Bersama BNN Kabupaten Dalam pelaksanaan P4GN.
3. Memfasilitasi kegiatan Forkopimda, Tim Kewaspadaan Dini Daerah. Tim Penanganan Konflik Sosial, Pemantauan Orang Asing, dan pencegahan tindakan radikalisme di daerah.
4. Fasilitasi pendataan ulang ormas di wilayah kabupaten Banyumas dan mempersiapkan sarana dan prasarana pendataan dan monitoringnya, membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas.
5. Memfasilitasi Partai Politik dalam pelaksanaan pendidikan politik
6. Melaksanakan sosialisasi, sarasehan pada masyarakat pemilih .

2.3 Review terhadap rancangan awal SKPD

Sesuai dengan Rancangan awal RKPD tahun 2025, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas memiliki 5 program yang terdiri dari :

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA
OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BANYUMAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI
1	2	3	4	8	9	10
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14.181.056.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			14.181.056.000,00	
	-	-			14.181.056.000,00	
1,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</i>	100 %	1.268.263.700,00	
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	<i>Jumlah kebijakan di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang disusun / direviu</i>	2 Kebijakan	1.268.263.700,00	
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	300 Orang	1.100.051.700,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>	100 Orang	151.712.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>	1 Keluarga	16.500.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
2,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Persentase pelaksanaan pendidikan politik</i>	100 %	6.476.602.712,00	
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	<i>Jumlah kebijakan di bidang politik yang disusun/direviu</i>	2 Kebijakan	6.476.602.712,00	
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	670 Orang	399.892.556,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	360 Orang	6.076.710.156,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
3,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas</i>	100 %	330.000.000,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Jumlah kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang disusun/direviu</i>	1 Kebijakan	330.000.000,00	
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	240 Orang	264.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	12 Laporan	66.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
4,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama</i>	100 %	423.720.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang disusun / direviu</i>	2 Kebijakan	423.720.000,00	
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	270 Orang	297.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Mersi
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	96 Orang	126.720.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
5,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing</i>	100 %	1.105.500.000,00	
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Jumlah Kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun / direviu</i>	2 Kebijakan	1.105.500.000,00	
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	270 Orang	445.500.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	90 Orang	110.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	12 Laporan	165.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	6 Dokumen	385.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Semua Kel/Desa
6,	-	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Rata rata persentase capaian kinerja kegiatan penunjang urusan perangkat daerah</i>	100 %	4.576.969.588,00	
	-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	564.576.144,00	
	-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	17.790.850,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				

			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	107.822.550,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	4 Paket	11.061.050,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	4 Paket	151.638.564,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				

			<i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>	4 Paket	27.289.680,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	248.973.450,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2 Laporan	74.163.100,00	
	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	6 Unit	65.230.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	8.933.100,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Laporan	477.140.862,00	
	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				

			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	12 Laporan	94.425.606,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	12 Laporan	382.715.256,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Laporan	336.090.150,00	
	-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				

			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>	17 Unit	134.805.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	1 Unit	156.746.150,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	44.539.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor

	-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	3.058.999.332,00	
	-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	69.036.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor
	-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>	23 Orang/bulan	2.989.963.332,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2025 disesuaikan dengan indikator program dan kegiatan yang telah disusun dalam RPD tahun 2024-2026, yang dijabarkan setiap tahunnya dengan target yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun berjalan. Adapun matrik usulan program dan kegiatan masyarakat untuk tahun 2025 disajikan sebagaimana pada tabel 4. Usulan program dan kegiatan dari para pemangku kepentingan tahun 2025 Kabupaten Banyumas.

No	PROGRAM	LOKASI	INDIKATOR	JUMLAH	KETERANGAN
1	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik	Kabupaten Banyumas	Prosentase pelaksanaan pendidikan politik	5.241.618.938,00	Dana Hibah Parpol dan Sosialisasi untuk pelaksanaan pendidikan politik
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kabupaten Banyumas	Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	1.268.263.700,00	Program Penanaman Ideologi Pancasila melalui Pembentukan Paskibraka dan Duta Pancasila serta Sosialisasi
3.	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Kabupaten Banyumas	Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas	329.000.000,00	Pemberdayaan dan Pengawasan Ormas
4	Program Pembinaan dan	Kabupaten Banyumas	Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan	423.700.800,00	Penguatan Ketahanan

	Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		ekonomi sosial budaya dan agama		Ekososbud dan Agama
5.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kabupaten Banyumas	Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing	1.105.500.000,00	Kegiatan Kewaspadaan Nasional dan Penangan Konflik

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Dalam mengimplementasikan perencanaan, pada penjabarannya dilakukan prioritas program dan kegiatan yang dilaksanakan. Prioritas program dan kegiatan tersebut menjadi pedoman pelaksanaan fungsi SKPD dalam merealisasikan perencanaan pembangunan.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas hanya melaksanakan fungsi kesatuan bangsa dan politik, sedangkan fungsi lain (perlindungan masyarakat) dilaksanakan oleh OPD pelaksana fungsi ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang kesatuan bangsa dan politik, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Kesbangpol Kabupaten Banyumas memiliki rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025, sebagai berikut :

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB.
BANYUMAS
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	8	9	10	11	15	16	17
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14.181.056.000,00				11.712.705.000,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			14.181.056.000,00				11.712.705.000,00	
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			14.181.056.000,00				11.712.705.000,00	
1,	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	5.241.618.938,00			-	5.035.866.548,00	

	8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	87.533.800,00			-	72.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	67.221.200,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		50.256.140,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								

			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	20.312.600,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		22.343.860,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2 Laporan	3.656.673.031,00			-	3.364.899.266,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23 Orang/bulan	3.597.093.031,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.288.959.666,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								

			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	12 Dokumen	59.580.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		75.939.600,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	2 Laporan	559.833.579,00			-	622.232.759,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	16.788.800,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		19.568.936,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								

			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	107.822.500,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		118.604.805,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								

			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	11.053.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		12.167.155,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								

			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	149.561.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		166.802.420,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	24.905.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		30.018.648,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								

			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	4 Laporan	248.973.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		273.870.795,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD								
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	1 Dokumen	730.279,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Wetan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.200.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	2 Laporan	84.221.500,00			-	81.580.410,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya								

			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	65.329.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		71.754.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			<i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	1 Unit	18.892.500,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		9.826.410,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	2 Laporan	579.772.028,00			-	524.854.948,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	121.100.384,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		103.868.166,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	458.671.644,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		420.986.782,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2 Laporan	273.585.000,00			-	369.699.165,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	81.291.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		148.285.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	156.744.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		172.420.765,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								

			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>	2 Unit	35.550.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		48.992.900,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2,	8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan</i>	100 %	1.268.263.700,00			-	1.386.600.897,00	

	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah kebijakan di bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan yang disusun / direviu	2 Kebijakan	1.268.263.700,00			-	1.386.600.897,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	300 Orang	1.100.051.700,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		1.201.567.697,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100 Orang	151.712.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		166.883.200,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara								

			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>	1 Keluarga	16.500.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		18.150.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3,	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	<i>Persentase pelaksanaan pendidikan politik</i>	100 %	5.812.702.712,00			-	3.424.417.555,00	

	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah kebijakan di bidang politik yang disusun/direviu	2 Kebijakan	5.812.702.712,00			-	3.424.417.555,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	670 Orang	399.892.556,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		399.892.555,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah								

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	250 Orang	5.412.810.156,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		3.024.525.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4,	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	<i>Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan ormas</i>	100 %	329.269.850,00			-	336.600.000,00	

	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan ormas yang disusun/direviu	1 Kebijakan	329.269.850,00			-	336.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	240 Orang	264.000.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		264.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah								

			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>	12 Laporan	65.269.850,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		72.600.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5,	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase pelaksanaan penguatan ketahanan ekonomi sosial budaya dan agama</i>	100 %	423.700.800,00			-	423.720.000,00	

	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Jumlah kebijakan pelaksanaan di bidang ketahanan ekonomi sosial, budaya yang disusun / direviu</i>	2 Kebijakan	423.700.800,00			-	423.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								

			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	270 Orang	296.990.800,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Mersi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		297.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah								

			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>	96 Orang	126.710.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		126.720.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6,	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>Persentase Pelaksanaan deteksi dini penanganan konflik dan pengawasan orang asing</i>	100 %	1.105.500.000,00			-	1.105.500.000,00	

	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial yang disusun / direviu	2 Kebijakan	1.105.500.000,00			-	1.105.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	270 Orang	445.500.000,00	Kab. Banyumas, Purwokerto Timur, Purwokerto Lor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		445.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah								

BAB IV**PENUTUP**

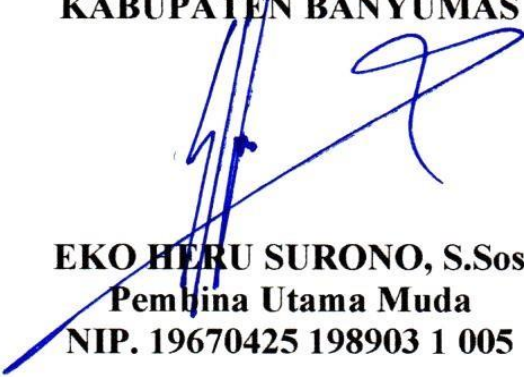
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) disusun sebagai upaya untuk mewujudkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas.

Seiring dengan tuntutan pemberdayaan dan partisipasi masyarakat serta keterlibatan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran dan kepedulian masyarakat yang lebih luas dalam pengelolaan lingkungan hidup, proses-proses penyadaran publik melalui kegiatan sosialisasi dan pelatihan tentang pengelolaan lingkungan hidup harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan sehingga dapat terbentuk perilaku masyarakat yang sadar lingkungan baik.

Pada masa yang akan datang akan terus diupayakan agar tingkat pencemaran kualitas air dan udara berada di bawah nilai ambang baku mutu lingkungan sehingga mutu air dan udara di Kabupaten Banyumas akan lebih baik dan sehat. Strategi yang ditempuh dilakukan melalui pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan serta melalui pendekatan penggunaan teknologi tepat guna agar tercipta keselarasan dengan lingkungannya. Semoga Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas ini dapat bermanfaat dan dilaksanakan dengan baik untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Banyumas.

Purwokerto, Juli 2024

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN BANYUMAS**



EKO HERU SURONO, S.Sos
Pemhina Utama Muda
NIP. 19670425 198903 1 005

EKO HERU SURONO, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19660127 198607 1 001